

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
INTISARI.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Politik Hukum.....	12
B. Konsep Negara Hukum.....	14
C. Kewenangan dan Tindakan Hukum Pemerintah.....	20
1. Kewenangan Pemerintah.....	20
2. Tindakan Hukum Pemerintah.....	24

D. Keputusan Tata Usaha Negara.....	30
1. Batasan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Para Sarjana.....	30
2. Batasan Keputusan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang.....	31
3. Unsur-Unsur Keputusan Tata Usaha Negara.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	42
B. Bahan Penelitian.....	43
C. Cara Penelitian.....	45
D. Alat Penelitian.....	45
E. Jalannya Penelitian.....	46
F. Analisis Hasil Penelitian.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Pergeseran Paradigma Keputusan Tata Usaha Negara Dari Fiktif Negatif Menjadi Fiktif Positif.....	49
1. Paradigma Keputusan Tata Usaha Negara yang Bersifat Fiktif Negatif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.....	53
2. Paradigma Keputusan Tata Usaha Negara yang Bersifat Fiktif Positif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.....	110
B. Implikasi Pergeseran Paradigma Fiktif Positif Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara.....	140

1. Implikasi Paradigma Fiktif Positif terhadap Mulai Berlaku dan Mengikatnya Keputusan Tata Usaha Negara.....	142
2. Implikasi Paradigma Fiktif Positif terhadap Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara dalam Memeriksa Keputusan Tata Usaha Negara.....	153
BAB V PENUTUP.....	157
A. Kesimpulan.....	157
B. Saran.....	159
DAFTAR PUSTAKA.....	161

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Komposisi Politik di DPR Pada Saat Pembahasan RUU PTUN....	54
Tabel 4.2. Komposisi Politik Panitia Khusus Pembahasan RUU PTUN.....	56
Tabel 4.3. Tabel Persandingan Substansi RUU PTUN dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.....	57
Tabel 4.4. Tabel Persandingan Substansi RUU AP dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.....	113

DAFTAR GAMBAR

Bagan 2.1. Skema Tindakan Hukum Pemerintahan.....	29
Bagan 2.2. Sifat Norma Hukum.....	39